

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-126/PJ/2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMERIKSAAN (*AUDIT PLAN*) UNTUK
MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

NOTA DINAS

Nomor : (2)
Tanggal : (3)

Kepada : Supervisor Kelompok (4)
Dari : (5)
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Penyusunan Rencana Pemeriksaan

Sehubungan dengan akan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib Pajak :

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Masa/Tahun Pajak : (9)
Kode Pemeriksaan : (10)

dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyusun usulan Rencana Pemeriksaan sesuai dengan SE-126/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 berdasarkan data sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

..... (11)

..... (12)
NIP (13)

PETUNJUK PENGISIAN	
Angka (1)	: diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)
Angka (2)	: diisi dengan nomor Nota Dinas
Angka (3)	: diisi dengan tanggal Nota Dinas
Angka (4)	: diisi dengan nama kelompok yang akan melakukan pemeriksaan, misalnya Kelompok I
Angka (5)	: diisi dengan jabatan Kepala UP2, yaitu Kepala Kantor atau Direktur
Angka (6)	: diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (7)	: diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka (8)	: diisi dengan alamat wajib Pajak
Angka (9)	: diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan
Angka (10)	: diisi dengan kode pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Angka (11)	: diisi dengan jabatan Kepala UP2, yaitu Kepala Kantor atau Direktur
Angka (12)	: diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala UP2
Angka (13)	: diisi dengan NIP Kepala UP2

Lampiran ND-..... (1)

DAFTAR BERKAS WAJIB PAJAK YANG DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak : (2)
NPWP : (3)
Masa/Tahun Pajak : (4)

No	Jenis Berkas WP	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1.	Data SPT a. SPT Tahunan PPh Badan b. SPT PPh Pasal 21 1) SPT Tahunan 2) SPT Masa..... (5) c. SPT PPh Pasal 22 Masa (5) d. SPT PPh Pasal 23 Masa..... (5) e. SPT PPh Pasal 26 Masa..... (5) f. SPT PPh Final 1) PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa..... (5) 2) PPh Final Pasal 15 Masa (5) 3) dst..... g. SPT PPN & PPn BM 1) PPN Dalam Negeri Masa..... (5) 2) PPn BM Masa..... (5) h. dst.....		
2.	Data Keuangan a. Laporan Keuangan Tahun (6) b. Daftar Harta dan Kewajiban Tahun (6)	(8)	(8)
3.	Profile Wajib Pajak a. Gambaran Usaha b. Komparatif laporan keuangan c. Pohon kepemilikan d. dst...		
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan a. Nomor Tahun Pajak..... (7) b. Nomor Tahun Pajak..... (7) c. dst		
5.	Data Lainnya a. Alat Keterangan / KP. Data b. Analisis Resiko c. Analisis dan pengembangan IDLP d. Hasil rekonsiliasi / ekualisasi e. Data Hutang/Tunggakan Pajak f. dst...		

Yang Menyerahkan			Yang Menerima		
..... (10)	Paraf	Tanggal	Supervisor Kelompok... (14)	Paraf	Tanggal
(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)

Pengembalian berkas :

Yang Menyerahkan			Yang Menerima		
..... (18)	Paraf	Tanggal	Supervisor Kelompok... (22)	Paraf	Tanggal
(19)	(20)	(21)	(23)	(24)	(25)

PETUNJUK PENGISIAN	
Angka (1)	: diisi dengan nomor Nota Dinas Kepala UP2 hal penyusunan Rencana Pemeriksaan
Angka (2)	: diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (3)	: diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka (4)	: diisi dengan Masa / Tahun Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan
Angka (5)	: diisi dengan Masa Pajak masing-masing SPT Masa
Angka (6)	: diisi dengan Tahun Laporan Keuangan dan Tahun Daftar Harta dan Kewajiban
Angka (7)	: diisi dengan nomor LHP dan Tahun Pajak
Angka (8)	: diisi dengan pilihan "Ada" atau "Tidak Ada" sesuai dengan data yang tersedia
Angka (9)	: diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan, misalnya <i>hardcopy</i> , <i>softcopy</i> , asli, fotokopi, dan lain-lain
Angka (10)	: dalam hal UP2 adalah KPP diisi dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, dalam hal UP2 adalah Kanwil DJP atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan diisi dengan pejabat yang berwenang
Angka (11)	: diisi dengan nama dan NIP pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (10)
Angka (12)	: diisi dengan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (10)
Angka (13)	: diisi dengan tanggal diserahkannya berkas Wajib Pajak kepada supervisor
Angka (14)	: diisi dengan nama kelompok yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (15)	: diisi dengan nama dan NIP Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (16)	: diisi dengan paraf Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (17)	: diisi dengan tanggal diterimanya berkas oleh Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (18)	: dalam hal UP2 adalah KPP diisi dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, dalam hal UP2 adalah Kanwil DJP atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan diisi dengan pejabat yang berwenang
Angka (19)	: diisi dengan nama dan NIP pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (18)
Angka (20)	: diisi dengan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (18)
Angka (21)	: diisi dengan tanggal diterimanya berkas oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (18)
Angka (22)	: diisi dengan nama kelompok yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (23)	: diisi dengan nama dan NIP Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (24)	: diisi dengan paraf Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (25)	: diisi dengan tanggal diserahkannya berkas kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka (18)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

IDENTIFIKASI MASALAH	Nama Wajib Pajak : (2) N P W P : (3) Masa / Tahun Pajak : (4)									
I. ANALISIS BERDASARKAN DATA YANG TERSEDIA A. DATA KEUANGAN / HARTA B. DATA SPT C. PROFIL WAJIB PAJAK D. HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA E. DATA LAIN YANG TERSEDIA (5) II. IDENTITAS MASALAH A. PPh Badan / PPh Orang Pribadi B. PPh Pasal 21 C. PPh Pasal 22 D. PPh Pasal 23 E. PPh Pasal 26 F. PPh Final pasal 4 (2) G. PPN DN H. dst L. Lokasi / cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan (6) <table><tr><td colspan="3">Disusun oleh :</td></tr><tr><td>Supervisor Kelompok (7)</td><td>Paraf</td><td>Tanggal</td></tr><tr><td>(8)</td><td>(9)</td><td>(10)</td></tr></table> INDEKS : (11)		Disusun oleh :			Supervisor Kelompok (7)	Paraf	Tanggal	(8)	(9)	(10)
Disusun oleh :										
Supervisor Kelompok (7)	Paraf	Tanggal								
(8)	(9)	(10)								

PETUNJUK PENGISIAN	
Angka (1)	: diisi dengan nama UP2
Angka (2)	: diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka (3)	: diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka (4)	: diisi dengan Masa /Tahun Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan
Angka (5)	: diisi dengan uraian analisis berdasarkan data yang tersedia
Angka (6)	: diisi dengan uraian identifikasi masalah berdasarkan hasil analisis data yang tersedia
Angka (7)	: diisi dengan nama kelompok yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (8)	: diisi dengan nama dan NIP Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (9)	: diisi dengan paraf Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (10)	: diisi dengan tanggal disusunnya KKP Identifikasi Masalah
Angka (11)	: diisi dengan kode indeks KKP sesuai ketentuan yang berlaku

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

RENCANA PEMERIKSAAN		Nama Wajib Pajak :	(2)
		N P W P :	(3)
		Masa / Tahun Pajak :	(4)

I. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Alamat Wajib Pajak : (5)
2. Klasifikasi Lapangan Usaha : (6)
3. Produk Utama dan Merek Produk : (7)
4. Nomor Telepon : (8)
5. Nomor Fax : (9)
6. Website : (10)
7. Alamat e-mail : (11)
8. Contact Person : (12)
9. Penanggung Jawab Wajib Pajak :

No	Nama	Jabatan	Telepon
(13)	(14)	(15)	(16)

10. Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
A. Koreksi

No	Masa/Tahun Pajak	Pos Yang Dikoreksi	Menurut		Koreksi
			SPT	Pemeriksa	
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

B. Penjelasan Koreksi

No	Pos Yang Dikoreksi	Penjelasan Koreksi
(23)	(24)	(25)

II. IDENTITAS TIM PEMERIKSA PAJAK

1. Susunan Tim Pemeriksa

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
(26)	(27)	(28)	(29)

2. Beban Tim Pemeriksa
Jumlah tunggakan pemeriksaan (SP2) Ketua Tim yang harus diselesaikan : SP2 (30)
a. Berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan
1) Seluruh jenis pajak (*all taxes*) : SP2 (31)
2) Satu / beberapa jenis pajak : SP2 (32)
3) Pemeriksaan tujuan lain : SP2 (33)
b. Pemeriksaan SPT Lebih Bayar (LB) yang jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan : SP2 (34)

III. URAIAN RENCANA PEMERIKSAAN

1. Kriteria Pemeriksaan : (35)
2. Jenis Pemeriksaan : (36)
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan : (37)

4. Identifikasi Masalah :

a.

b.

c.

d. dan seterusnya.

(38)

5. Tanggal selesai pemeriksaan : (39)

6. Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak : (40)

8. Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan : (41)

9. Sarana Pendukung Yang Diperlukan : (42)

10. Pos-pos SPT Yang Akan Diperiksa

No	Jenis Pajak	Nama Pos / Pos Turunan	Alasan
(43)	(44)	(45)	(46)

11. Lokasi / cabang WP yang akan diperiksa atau dimintakan pemeriksaan lokasi

No	Nama Lokasi / Cabang	NPWP	Alasan	UP2
(47)	(48)	(49)	(50)	(51)

Disusun oleh Supervisor Kelompok (52)

Tanggal (53)

....., (56)

Disetujui oleh (57)

..... (54)

NIP (55)

..... (58)

NIP (59)

INDEKS : (60)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi dengan nama UP2
 Angka (2) : diisi dengan nama Wajib Pajak
 Angka (3) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
 Angka (4) : diisi dengan Masa / Tahun Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan
 Angka (5) : diisi dengan alamat Wajib Pajak
 Angka (6) : diisi dengan nama dan kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
 Angka (7) : diisi dengan nama produk utama dan merk produk Wajib Pajak
 Angka (8) : diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang dapat dihubungi untuk korespondensi
 Angka (9) : diisi dengan nomor fax Wajib Pajak (jika ada)
 Angka (10) : diisi dengan nama *website* Wajib Pajak (jika ada)
 Angka (11) : diisi dengan alamat *e-mail* Wajib Pajak (jika ada)
 Angka (12) : diisi dengan nama wakil atau pegawai Wajib Pajak yang dapat dihubungi untuk korespondensi
 Angka (13) : diisi dengan nomor urut
 Angka (14) : diisi dengan nama wakil atau pegawai Wajib Pajak sebagai Penanggung Jawab Wajib Pajak
 Angka (15) : diisi dengan jabatan wakil atau pegawai Wajib Pajak sebagai Penanggung Jawab Wajib Pajak
 Angka (16) : diisi dengan nomor telepon wakil atau pegawai Wajib Pajak sebagai Penanggung Jawab Wajib Pajak
 Angka (17) : diisi dengan nomor urut
 Angka (18) : diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diperiksa tahun-tahun sebelumnya
 Angka (19) : diisi dengan pos SPT yang dikoreksi berdasarkan LHP tahun-tahun sebelumnya
 Angka (20) : diisi dengan nilai menurut Wajib Pajak berdasarkan LHP tahun-tahun sebelumnya
 Angka (21) : diisi dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak berdasarkan LHP tahun-tahun sebelumnya
 Angka (22) : diisi dengan nilai koreksi berdasarkan LHP tahun-tahun sebelumnya
 Angka (23) : diisi dengan nomor urut
 Angka (24) : diisi dengan pos SPT yang dikoreksi berdasarkan LHP tahun-tahun sebelumnya
 Angka (25) : diisi dengan alasan dilakukannya koreksi pada angka (22) berdasarkan LHP tahun-tahun sebelumnya
 Angka (26) : diisi dengan nomor urut
 Angka (27) : diisi dengan nama lengkap dan NIP Tim Pemeriksa Pajak
 Angka (28) : diisi dengan pangkat/golongan Tim Pemeriksa Pajak
 Angka (29) : diisi dengan jabatan dalam Tim Pemeriksa Pajak, yaitu Supervisor, Ketua Tim, atau Anggota Tim
 Angka (30) : diisi dengan jumlah seluruh pemeriksaan (SP2) Ketua Tim yang belum selesai, yang akan dirinci pada angka (31), (32), dan (33)
 Angka (31) : diisi dengan jumlah pemeriksaan (SP2) Ketua Tim dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (*all taxes*) yang belum diselesaikan
 Angka (32) : diisi dengan jumlah pemeriksaan (SP2) Ketua Tim dengan ruang lingkup satu / beberapa jenis pajak yang belum diselesaikan
 Angka (33) : diisi dengan jumlah pemeriksaan (SP2) tujuan lain Ketua Tim yang belum diselesaikan
 Angka (34) : diisi dengan jumlah pemeriksaan (SP2) SPT LB Ketua Tim yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) bulan
 Angka (35) : diisi dengan kriteria pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus
 Angka (36) : diisi dengan jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan
 Angka (37) : diisi dengan ruang lingkup pemeriksaan, yaitu seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau satu/beberapa jenis pajak
 Angka (38) : diisi dengan ringkasan masalah yang diidentifikasi dalam KPP Identifikasi Masalah
 Angka (39) : diisi dengan target tanggal pemeriksaan diselesaikan (perkiraan tanggal LHP)
 Angka (40) : diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SPT LB)
 Angka (41) : diisi dengan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan, misalnya e-auditor
 Angka (42) : diisi dengan sarana pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan, misalnya *audit tool software* ACL
 Angka (43) : diisi dengan nomor urut
 Angka (44) : diisi dengan jenis pajak sesuai ruang lingkup pemeriksaan
 Angka (45) : diisi dengan nama pos/pos turunan SPT yang akan diperiksa (dilakukan pengujian) berdasarkan KKP Identifikasi Masalah
 Angka (46) : diisi dengan alasan dilakukannya pemeriksaan atau pengujian berdasarkan KKP Identifikasi Masalah
 Angka (47) : diisi dengan nomor urut
 Angka (48) : diisi dengan nama lokasi/cabang yang akan dilakukan pemeriksaan atau dimintakan pemeriksaan lokasi berdasarkan KKP Identifikasi Masalah
 Angka (49) : diisi dengan NPWP lokasi/cabang yang akan dilakukan pemeriksaan atau dimintakan pemeriksaan lokasi berdasarkan KKP Identifikasi Masalah
 Angka (50) : diisi dengan alasan pemilihan lokasi/cabang yang akan dilakukan pemeriksaan atau dimintakan pemeriksaan lokasi berdasarkan KKP Identifikasi Masalah
 Angka (51) : diisi dengan nama UP2 lokasi/cabang yang akan dilakukan pemeriksaan atau dimintakan pemeriksaan lokasi berdasarkan KKP Identifikasi Masalah
 Angka (52) : diisi dengan nama kelompok yang akan melakukan pemeriksaan
 Angka (53) : diisi dengan tanggal penyusunan Rencana pemeriksaan
 Angka (54) : diisi dengan tanda tangan dan nama Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
 Angka (55) : diisi dengan NIP Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
 Angka (56) : diisi dengan nama kota dan tanggal persetujuan Rencana Pemeriksaan
 Angka (57) : diisi dengan jabatan Kepala UP2, yaitu Kepala Kantor atau Direktur
 Angka (58) : diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala UP2
 Angka (59) : diisi dengan NIP Kepala UP2
 Angka (60) : diisi dengan kode indeks KKP sesuai ketentuan yang berlaku

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN I/II/....		Nama Wajib Pajak :	(2)
		N P W P :	(3)
		Masa / Tahun Pajak :	(4)

No	Uraian Rencana Pemeriksaan Yang Diubah	Rencana Pemeriksaan Sebelumnya	Rencana Pemeriksaan Yang Dimutakhirkan	Alasan Perubahan
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Catatan : (10)

Disusun oleh Supervisor Kelompok (11)
Tanggal (12)

...../...../..... (15)
Disetujui/Tidak Disetujui*) oleh (16)

..... (13)
NIP (14)

..... (17)
NIP (18)

*) Coret yang tidak perlu

INDEKS : (19)

PETUNJUK PENGISIAN	
Angka (1)	: diisi dengan Nama UP2
Angka (2)	: diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka (3)	: diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka (4)	: diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan
Angka (5)	: diisi dengan nomor urut
Angka (6)	: diisi dengan po/pos turunan SPT yang direncanakan dilakukan pemeriksaan/pengujian
Angka (7)	: diisi dengan uraian pemeriksaan/pengujian sesuai dengan Rencana Pemeriksaan sebelumnya
Angka (8)	: diisi dengan uraian perubahan pemeriksaan/pengujian
Angka (9)	: diisi dengan alasan dilakukannya perubahan pemeriksaan/pengujian
Angka (10)	: diisi dengan catatan tertentu Kepala UP2, dalam hal Kepala UP2 tidak menyetujui sebagian atau seluruh Usulan Perubahan Rencana Pemeriksaan, Kepala UP2 wajib mengisi dengan alasan penolakannya
Angka (11)	: diisi dengan nama kelompok yang melakukan pemeriksaan
Angka (12)	: diisi dengan tanggal penyusunan Perubahan Rencana Pemeriksaan
Angka (13)	: diisi dengan tanda tangan dan nama Supervisor yang akan melakukan pemeriksaan
Angka (14)	: diisi dengan NIP Supervisor yang melakukan pemeriksaan
Angka (15)	: diisi dengan nama kota dan tanggal persetujuan Perubahan Rencana Pemeriksaan
Angka (16)	: diisi dengan jabatan Kepala UP2, yaitu Kepala Kantor atau Direktur
Angka (17)	: diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala UP2
Angka (18)	: diisi dengan NIP Kepala UP2
Angka (19)	: diisi dengan kode indeks KKP sesuai ketentuan yang berlaku

CONTOH IDENTIFIKASI MASALAH

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP XXX
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

IDENTIFIKASI MASALAH	Nama Wajib Pajak : PT Abcdefgh N P W P : 01.234.567.8-666.000 Tahun : Januari - Desember 2009
I. ANALISIS BERDASARKAN DATA YANG TERSEDIA	
A. DATA KEUANGAN	
Berdasarkan komparatif atas data keuangan berupa neraca dan laba rugi terdapat hal-hal yang perlu dilakukan analisis :	
- Saldo piutang usaha terkait langsung dengan penjualan mengalami kenaikan sebesar 18% supaya digunakan juga sebagai dasar pengujian atas penjualan dan ketetapan penerbitan faktur pajak. - Nilai persediaan akhir mengalami kenaikan sebesar 12%, data ini akan mendukung pengujian penjualan dan keberadaan persediaan secara fisik yang menyangkut masalah volume dan tempat penyimpanan. - Adanya pos baru bangunan dalam pelaksanaan perlu mendapat perhatian dalam hal memastikan apakah ada objek PPN membangun sendiri. - Terdapat penurunan saldo biaya dibayar dimuka sebesar 10%, jumlah ini bisa jadi mempengaruhi objek Pemotongan dan pemungutan PPh. - Adanya kenaikan harga perolehan aktiva yang disebabkan adanya pembelian aktiva baru yang perlu dipastikan kebenaran keberadaan dan perhitungan penyusutannya. - Terdapat kenaikan hutang bank sebesar 9% perlu dipastikan kegunaan dan sumbernya - Uang muka penjualan walaupun terjadi penurunan saldo tetap harus dipastikan pemungutan PPN-nya. - dst...	
B. DATA SPT	
- SPT PPh Badan Berdasarkan hasil komparatif yang dilakukan dengan tahun sebelumnya dan laporan laba rugi komersial diperoleh hal-hal sebagai berikut : - Peredaran usaha mengalami kenaikan 11%, berdasarkan laporan keuangan komponen yang mengalami kenaikan signifikan adalah penjualan ekspor. - Harga pokok penjualan mengalami kenaikan 13 % lebih tinggi dibandingkan kenaikan penjualan. - Biaya usaha mengalami kenaikan 9% dan yang mengalami kenaikan signifikan adalah biaya gaji, promosi dan pemeliharaan. - Penghasilan (biaya) luar usaha, adanya kenaikan atas biaya bunga bank. - Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, berdasarkan laporan keuangan ini merupakan jasa giro dan penghasilan sewa bangunan. - Penyesuaian fiskal Wajib Pajak, bagian yang terisi adalah penyesuaian positif atas natura dan koreksi negatif atas penyusutan. - dst ... - SPT PPh Pasal 21 - Objek terdiri dari penghasilan bruto pegawai tetap dan tidak tetap. - Dari hasil ekualisasi yang dilakukan terhadap biaya gaji dan upah, jumlah objek dalam SPT PPh Pasal 21 lebih besar. - dst ... - SPT PPh Pasal 23 (Masa Januari s.d Desember) - Objek pajak terdiri dari jasa manajemen dan jasa perencanaan konstruksi. - Berdasarkan hasil ekualisasi dengan biaya usaha terdapat nilai yang berbeda atas jasa perencanaan konstruksi. - Dari hasil perbandingan antara DPP Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN dengan Bukti Potong PPh Pasal 23 terdapat perbedaan nilai untuk Bukti Potong tertentu. - dst ...	

4. SPT PPN DN (Masa Januari s.d Desember)
 - a. DPP PPN terdiri dari penyerahan ekspor dan penyerahan dalam negeri.
 - b. Berdasarkan ekualisasi dengan peredaran usaha terdapat perbedaan penyerahan ekspor dengan penjualan ekspor.
 - c. Pajak Masukan berasal dari KKP dalam negeri dan PPN Impor. Total faktur pajak masukan Januari s.d Desember sebanyak 652 faktur dan 14 SSP Impor. Terdapat pajak masukan yang berasal dari tahun pajak sebelumnya.
 - d. dst ...
5. PPB
 - a. Objek adalah tanah dan bangunan pabrik
 - b. Dari data ekstensifikasi terdapat aktiva berupa tanah di Depok
 - c. dst ...
6. dst ...

C. PROFIL WAJIB PAJAK

Hal-hal yang dapat diinformasikan dari profil WP :

1. Terdapat informasi pohon kepemilikan saham yang dapat digunakan sebagai bahan untuk identifikasi hubungan.
2. AR telah melakukan himbauan mengenai kebenaran Bukti Potong PPh Pasal 23 tahun pajak 2009 yang berbeda dengan Faktur Pajak tetapi belum ditanggapi oleh WP.
3. AR telah melakukan himbauan kepada WP untuk menjelaskan perbedaan DPP PPN dan peredaran usaha tetapi belum ditanggapi oleh WP.
4. Tersedia laporan keuangan komparatif sampai dengan 3 tahun terakhir.
5. dst ...

D. HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

Terdapat 2 LHP tahun sebelumnya dengan informasi koreksi sebagai berikut :

1. Lap-12x/WPJ ... Tahun Pajak 2007 :
 - a. Koreksi atas HPP dari pembelian yang disebabkan oleh *mark-up* pembelian bahan baku yang berasal dari *related party* dan non PKP
 - b. Koreksi atas biaya promosi, yaitu pengeluaran natura yang belum dilakukan penyesuaian fiskal.
 - c. Koreksi atas biaya penyusutan aktiva untuk karyawan tertentu yang sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 hanya dapat dibebankan sebesar 50% dan adanya kesalahan pengelompokan.
 - d. dst ...
2. Lap-23xx/WPJ...Tahun Pajak 2005:
 - a. dst...

E. DATA LAIN YANG TERSEDIA

1. Analisis Risiko yang dibuat oleh AR
 - a. Terdapat perbedaan objek PPh Pasal 23 atas jasa perencanaan konstruksi antara Bukti Potong PPh Pasal 23 Nomor 215/BP-23/2009 sebesar Rp 25.000.000 dengan Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.09.00000099 sebesar Rp 35.000.000
 - b. Terdapat perbedaan peredaran usaha dan DPP PPN, yaitu peredaran usaha menunjukkan nilai sebesar Rp 298.500.000 sedangkan DPP PPN menunjukkan nilai sebesar Rp 238.000.000
2. Alat Keterangan
Terdapat alat keterangan dari lawan transaksi berupa perjanjian kontrak pelaksanaan konstruksi.
3. Data ekspor impor
Berdasarkan data ekspor dari Internet Portal DJP diketahui jumlah nilai ekspor tidak sama dengan data WP, demikian pula nilai impornya.
4. Data MPN
Dari data MPN tidak semua SSP Wajib Pajak terdapat di MPN sehingga terjadi selisih jumlah SSP dengan MPN karena tidak tercantum NTPN.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

A. PPh Badan

1. Peredaran Usaha
Dari analisis di atas diketahui bahwa terdapat kenaikan signifikan terhadap penjualan ekspor, terdapat perbedaan nilai ekspor dengan DPP PPN dan data ekspor Portal DJP jumlahnya melebihi yang telah dilaporkan sehingga pos penjualan ekspor harus dilakukan pengujian kepatuhan pelaporannya.
2. Harga Pokok Penjualan
 - a. Hasil pemeriksaan tahun sebelumnya terdapat nilai *mark up* atas sebagian pembeliannya. Data impor dari Portal DJP juga terdapat perbedaan dengan nilai impor dan SSP yang dikreditkan. Sehingga pembelian ini harus dilakukan pengujian untuk memastikan kepatuhan pelaporannya.
 - b. Data persediaan akhir yang cenderung naik dapat dilakukan pengujian atas eksistensi persediaan. Dari data profil WP terdapat informasi bahwa produk akhir dalam kemasan kaleng dimana perhitungan matematis tempat penyimpanan untuk luas $1m^3$ dapat menampung 80 kaleng kemasan barang jadi.
 - c. Harga pokok produksi satu kaleng rata-rata Rp 75.200,- sehingga dari total persediaan akhir dalam neraca sekitar 11.875 kaleng membutuhkan tempat penyimpanan lebih dari $148 m^3$. Sehingga perlu dilakukan pengujian atas nilai persediaan ini terkait dengan kapasitas gudang dan kepemilikannya.
 - d. Dari analisis *gross profit margin* dan *benchmark*, diketahui bahwa *gross profit margin* Wajib Pajak lebih rendah 1,5 % dibandingkan rata-rata industri.

- e. Atas biaya tenaga kerja langsung dan bonus perlu dilakukan pengujian untuk memastikan kesesuaian dengan pelaporan objek PPh Pasal 21.
- 3. Biaya usaha lainnya
dst ...

B. PPh Pasal 21

- 1. Dari profit diketahui bahwa Wajib Pajak telah menggunakan sistem *payroll* dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan. Sesuai data dan ekualisasi terdapat selisih atas objek dengan biaya, demikian pula dengan hasil pemeriksaan sebelumnya menunjukkan adanya koreksi atas objek PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas objek PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap.
- 2. dst ...

C. PPh Pasal 23

- 1. Dari jenis objek yang menjadi fokus pengujian adalah jasa perencanaan konstruksi. Berdasarkan data dan analisis diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan pajak masukan dan adanya pos bangunan dalam pelaksanaan perlu dilakukan pengujian kepatuhan terhadap pemotongan objek dari pos tersebut.
- 2. dst ...

D. PPh Final Pasal 4 (2)

- 1. Perlu dilakukan pengujian atas pemotongan objek dari jasa pelaksanaan konstruksi berkaitan juga dengan adanya penambahan bangunan dalam pelaksanaan.
- 2. dst ...

E. PPN DN

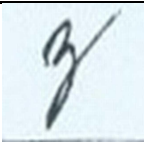
- 1. a. Dari ekualisasi DPP PPN dengan penjualan terdapat perbedaan nilai dan berdasarkan himbauan AR juga belum diperoleh jawaban dari WP, atas selisih objek selain ekspor perlu dilakukan pengujian kepatuhan pemungutan dan penerbitan faktur atas penyerahan dalam negeri.
b. Pengujian atas penjualan pada PPh Badan fokus pada ekspor termasuk dalam pengujian atas kebenaran pelaporan penyerahan ekspor di PPN. Pengujian atas penyerahan dalam negeri menggunakan teknik ekualisasi untuk memastikan apakah penyerahan selain penjualan telah dipungut PPN dan dilaporkan tepat waktu, seperti uang muka dan pempfakturan antar waktu.
- 2. Atas penambahan bangunan dalam pelaksanaan pengujian dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 16C UU PPN.
- 3. dst ...

F. PBB

- 1. dst ...

G. Lokasi /cabang Wajib Pajak yang akan dimintakan pemeriksaan

Lokasi/cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan adalah cabang yang beralamat di Jl. NNN No 60 Depok dengan UP2 Lokasi KPP "DEF", Jl. MMM No 45 Depok dengan lokasi UP2 KPP "DEF", Jl. AAA No 31 Bekasi dengan lokasi UP2 KPP "XYZ" dengan alasan cabang-cabang tersebut memberikan kontribusi peredaran usaha terbesar. Cabang ini memiliki pengaruh yang dominan terhadap domisili sesuai dengan ketentuan SE-10/PJ/2008.

Disusun oleh :		
Supervisor Kelompok I	Paraf	Tanggal
Sirmu Setyasmoko NIP 1971xxxxxxxxxxxxxx		10 November 2010

CONTOH RENCANA PEMERIKSAAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP XXX
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

RENCANA PEMERIKSAAN		Nama Wajib Pajak : PT Abcdefgh N P W P : 01.234.567.8-666.000 Masa / Tahun Pajak : Januari - Desember 2009			
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. Alamat Wajib Pajak : Jl. KLM No 555 Tangerang 2. Klasifikasi Lapangan Usaha : 24293 Industri Pewarna 3. Produk Utama dan Merk Produk : Pewarna tekstil, Merk "Shi Law" 4. Nomor Telepon : 021-55xxxxx 5. Nomor Fax : 021-55xxxxx 6. Website : www.abcdefgh.com 7. Alamat e-mail : cs@abcdefgh.com 8. Contact Person : Humisar Ariestino 9. Penanggung Jawab Wajib Pajak :					
No	Nama	Jabatan	Telepon		
1.	I Wayan Darmawan	Direktur Keuangan	021-xxxxxxx		
10. Hasil Pemeriksaan Sebelumnya					
A. Koreksi					
No	Masa/Tahun Pajak	Pos Yang Dikoreksi	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1.	Januari - Desember 2007	HPP _ Pembelian Biaya promosi Biaya Penyusutan Penyesuaian fiskal positif Objek PPh Pasal 21 DPP PPN dst ..	2,536,489,430 323,556,500 73,826,810 - 125,462,500 3,652,751,790	2,368,598,040 231,563,400 68,352,800 (126,542,788) 162,575,700 3,672,751,790	167,891,390 91,993,100 5,474,010 126,542,788 37,113,200 20,000,000
2.	Januari - Desember 2005	Biaya promosi dst ...	156,261,570	142,875,380	13,386,190
B. Penjelasan Koreksi					
No	Masa/Tahun Pajak dan Pos Yang Dikoreksi	Penjelasan Koreksi			
I.	Januari - Desember 2007				
1.	HPP - Pembelian	Mark-up pembelian bahan baku yang berasal dari <i>related party</i> dan non PKP.			
2.	Biaya promosi	Merupakan pengeluaran natura yang belum dilakukan penyesuaian fiskal.			
3.	Biaya penyusutan	Biaya penyusutan aktiva untuk karyawan tertentu yang sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 hanya dapat dibebankan sebesar 50% dan adanya kesalahan pengelompokan.			
4.	Penyesuaian fiskal positif	Wajib Pajak menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dari sewa bangunan sebagian ruang kantor dari pihak lain. Sesuai ketentuan PP-138 Th 2000 biaya usaha yang terkait langsung dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan dan biaya tidak langsungnya tidak boleh dikurangkan atau seharusnya dihitung secara proporsional.			
5.	Objek PPh Pasal 21	Pembayaran bonus karyawan dan notaris yang belum diperhitungkan.			
6.	DPP PPN	Uang muka pelanggan yang belum diperhitungkan sebagai objek PPN.			
7.	dst ...				
II.	Januari - Desember 2005				
1.	dst ...				

II. IDENTITAS TIM PEMERIKSA PAJAK

1. Susunan Tim Pemeriksa

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Sirmu Setyasmoko / 1971xxxxxxxxxxxxxx	Penata Tk. I / IIId	Supervisor
2.	Emika Niken Fifiana / 1976xxxxxxxxxxxxxx	Penata Muda Tk. I / IIb	Ketua Tim
3.	Arifin Nur Rochman / 1983xxxxxxxxxxxxxx	Penata Muda / IIIa	Anggota Tim

2. Beban Tim Pemeriksa

Jumlah tunggakan pemeriksaan (SP2) Ketua Tim yang harus diselesaikan	:	12 SP2
a. Berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan		
1) Seluruh jenis pajak (<i>all taxes</i>)	:	6 SP2
2) Satu/beberapa jenis pajak	:	4 SP2
3) Pemeriksaan tujuan lain	:	2 SP2
b. Pemeriksaan SPT Lebih Bayar (LB) yang jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan	:	2 SP2

III. URAIAN RENCANA PEMERIKSAAN

1. Kriteria Pemeriksaan : Pemeriksaan Khusus
2. Jenis Pemeriksaan : Pemeriksaan Lapangan
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan : Seluruh Jenis Pajak (*all taxes*)
4. Identifikasi Masalah

a. Peredaran Usaha dilaporkan lebih rendah (*understated*) terkait dengan data ekspor.

b. Pembelian bahan dilaporkan lebih tinggi (*overstated*) terkait dengan data impor dan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

c. Persediaan akhir dari perhitungan kuantitas perlu dipastikan eksistensi dalam penyimpanannya.

d. Biaya tenaga kerja langsung dan bonus perlu dilakukan pengujian untuk memastikan kesesuaian dengan pelaporan objek PPh Pasal 21.

e. Biaya promosi perlu diuji kebenarannya terkait dengan kemungkinan adanya biaya yang tidak dapat dikurangkan.

f. Biaya pemeliharaan perlu diuji kebenarannya terkait kenaikannya yang signifikan.

g. Terdapat kesalahan penghitungan penyusutan aktiva tetap tahun sebelumnya dan perolehan baru yang perlu dipastikan eksistensi termasuk kebenaran perhitungan penyusutan. Aktiva bangunan dalam penyelesaian perlu dipastikan nilai yang dapat diakui sesuai Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh juga terkait objek pajak lainnya.

h. Biaya bunga bank dibebankan seluruhnya, padahal ada penambahan hutang bank yang dimungkinkan terkait dengan bangunan dalam pelaksanaan sehingga terindikasi *overstated* yang semestinya sebagian dikapitalisasi ke aktiva.

i. Adanya penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dari sewa bangunan, WP belum melakukan koreksi fiskal atas biaya langsung dan tidak langsungnya, sehingga perlu dihitung ulang berdasarkan PP-138 Tahun 2000 untuk menentukan jumlah biaya yang dapat dikurangkan.

j. dst s.d PBB
5. Tanggal selesai pemeriksaan : 10 Februari 2011
6. Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak : -
7. Tenaga ahli yang dibutuhkan : -
8. Sarana pendukung yang diperlukan : -
9. Pos-pos SPT yang akan diperiksa

No	Jenis Pajak	Nama Pos / Pos Turunan	Alasan
1	PPh Badan	Peredaran Usaha/Pejualan Ekspor	Indikasi terjadinya <i>understated</i>
		Peredaran Usaha/Piutang Usaha Ekspor	Pengujian arus uang untuk mendukung pengujian ketepatan pelaporan penjualan ekspor.
		Peredaran Usaha/Kas dan Bank	Pengujian arus uang untuk mendukung pengujian ketepatan pelaporan penjualan ekspor.
		HPP/Pemakaian/Pembelian Bahan	Terdapat indikasi terjadinya <i>mark-up</i> harga pembelian
		HPP/Persediaan Akhir Barang Jadi	Terindikasi jumlahnya <i>overstated</i>
		HPP/Biaya Tenaga Kerja Langsung	Memastikan kesesuaian dengan pelaporan objek PPh Pasal 21
		HPP/Biaya Overhead/Bonus	Adanya pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan
		Biaya Usaha Lainnya/Promosi	
		Biaya Usaha Lainnya/Pemeliharaan	Memastikan pemanfaatannya terkait kenaikannya yang signifikan
		Biaya Usaha Lainnya/Penyusutan	Kesalahan perhitungan tahun sebelumnya dan adanya aktiva tetap baru
		Biaya Dari Luar Usaha/Biaya Bunga	Bunga pinjaman yang semestinya dikapitalisasi
		Biaya Dari Luar Usaha/Biaya Bunga/ Hutang Bank	Mendukung pengujian ketepatan penghitungan biaya bunga bank dan penggunaannya
		Penyesuaian Fiskal/Biaya atas Penghasilan Final	Belum dilakukan penyesuaian fiskal terhadap biaya terkait penghasilan sewa bangunan yang telah dikenakan PPh Final
		Kredit Pajak PPh Badan	Pengecekan keabsahan kredit pajak serta ketepatan pengkreditannya

2	PPh Pasal 21	Objek Pajak/Pegawai Tidak Tetap Kredit Pajak PPh Pasal 21	Memastikan objek PPh Pasal 21 terkait dengan peningkatan Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Bonus terhadap Pegawai Tidak Tetap. Pengecekan keabsahan kredit pajak serta ketepatan pengkreditannya.
3	PPh Pasal 23	Objek Pajak/Jasa Perencanaan Konstruksi Kredit Pajak PPh Pasal 23	Memastikan objek pajak jasa perencanaan konstruksi terkait dengan bangunan dalam pelaksanaan dan data pajak masukan. Pengecekan keabsahan kredit pajak serta ketepatan pengkreditannya.
4	PPh Pasal 4 (2)	Objek Pajak/Jasa Pelaksanaan Konstruksi Kredit Pajak PPh Pasal 4 (2)	Memastikan objek terkait dengan adanya pengeluaran bangunan dalam pelaksanaan. Tidak diperiksa karena Wajib Pajak tidak ada pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2).
5	PPN DN	DPP/Penyerahan Ekspor DPP/Uang Muka DPP/Pemfakturan Antarwaktu DPP/Pasal 16C Pajak yang dapat diperhitungkan (kredit Pajak)	Indikasi terjadinya <i>understated</i> } Terdapat selisih objek PPN, uang muka dan pemfakturan antar waktu yang perlu diuji kepatuhannya. Memastikan pengenaan PPN Pasal 16C terkait dengan bangunan dalam pelaksanaan Pengecekan keabsahan kredit pajak serta ketepatan pengkreditannya
6	PBB	Objek Pajak	Memastikan tanah dan bangunan yang dimiliki.

10. Lokasi/cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan lokasi

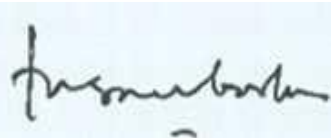
No	Nama/Lokasi Cabang	NPWP	Alasan	UP2
1.	Jl. NNN No 60 Depok	01.234.567.8-888.001	Memberikan kontribusi peredaran usaha terbesar	KPP "DEF"
2.	Jl. MMM No. 45 Depok	01.234.567.8-888.003		KPP "DEF"
3.	Jl. AAA No 31 Bekasi	01.234.567.8-555.001		KPP "XYZ"

Disusun oleh Supervisor Kelompok I
Tanggal 11 November 2010

Tangerang, 12 November 2010
Disetujui oleh Kepala Kantor,



Sirmu Setyasmoko
NIP 1971xxxxxxxxxxxxxx



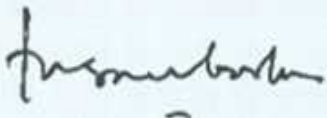
Rinaldi Trisambodo
NIP 1961xxxxxxxxxxxxxx

LAMPIRAN VI C
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-126/PJ/2010
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN (AUDIT PLAN) UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

CONTOH PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP XXX
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN				Nama Wajib Pajak : PT Abcdefgh N P W P : 01.234.567.8-666.000 Masa / Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
No	Uraian Rencana Pemeriksaan Yang Diubah	Rencana Pemeriksaan Sebelumnya	Rencana Pemeriksaan Yang Dimutakhirkan	Alasan Perubahan
1.	PPH Pasal 23/Jasa Manajemen	Tidak dilakukan Pengujian	Dilakukan Pengujian	Pada saat dilakukan pemeriksaan atas pos biaya promosi terdapat objek jasa manajemen yang belum ada bukti pemotongan PPh Pasal 23.
2.	PPH Final Ps 4 (2) / Jasa Pelaksanaan Konstruksi	Dilakukan pengujian	Tidak dilakukan pengujian	Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, objek yang semula diperkirakan terjadi di domisili, ternyata telah diperhitungkan dan dilaporkan sebagai objek di KPP Lokasi.
3.	PPH Pasal 26	Tidak dilakukan pengujian	Dilakukan pengujian	Terdapat pembayaran jasa manajemen ke WPLN.
4.	PPN Jasa Luar Negeri	Tidak dilakukan pengujian	Dilakukan pengujian	Terdapat pemanfaatan jasa dari luar negeri terkait dengan nomor 3.
Catatan :				
Disusun oleh Supervisor Kelompok I Tanggal 15 Desember 2010  Sirmu Setyasmoko NIP 1971xxxxxxxxxxxxxx Tangerang, 17 Desember 2010 Disetujui / Tidak Disetujui*) oleh Kepala Kantor  Rinaldi Trisambodo NIP 1961xxxxxxxxxxxxxx				
				INDEKS : A.1-P